



MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH SMA SWASTA
M U K A S T A
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretariat : SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
e-mail : smamuh3yogya@yahoo.com
Alamat : Jl. Kapt. Piere tendean No. 58 Yogyakarta

Telepon : (0274) 376901
Faksimile : (0274) 389976
Handphone : 08121574133

Buah Pikiran / Aspirasi Musyawarah Kerja Kepala SMA Swasta (MUKASTA)
Daerah Istimewa Yogyakarta

Disampaikan pada saat Audensi dengan DPRD DIY
Rabu 18 September 2019

- A. Musyawarah Kerja Kepala SMA Swasta (MUKASTA) Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan ucapan selamat berbahagia kepada seluruh anggota DPRD DIY periode 2019-2024 yang baru saja dilantik dan selamat menjalankan tugas, dengan doa dan harapan semoga selalu amanah dan senantiasa siap mendengarkan serta memperjuangkan kepentingan warga DIY demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama , sekaligus berkontribusi bagi kejayaan NKRI
- B. Musyawarah Kerja Kepala SMA Swasta (MUKASTA) Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD DIY atas berkenannya menerima dan mendengarkan aspirasi yang berkaitan dengan keberadaan sekolah/ SMA swasta di DIY.
- C. Musyawarah Kerja Kepala SMA Swasta (MUKASTA) Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan SMA Swasta di DIY, sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Jika melihat sejarah perjalanan bangsa Indonesia, apalagi ketika negara belum mampu menata dan memfasilitasi pendidikan bagi warganya, maka peranan masyarakat atau swasta dalam bidang pendidikan terasa sangat besar pengaruh dan peranannya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Bahkan jauh sebelum republik ini berdiri, secara historis pendidikan swasta sesungguhnya

merupakan elemen utama dan pertama sebagai penggerak pendidikan di Indonesia. Sebut saja, Tamansiswa, Muhammadiyah, Ma'arif NU, Sekolah Katolik, Sekolah Kristen, dll.

Bahkan dimasa sekarangpun keberadaan sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat / swasta tersebut tetap saja berperan besar dan menjadi tiang penyangga keberlangsungan pendidikan di Indonesia.

Namun begitu, di tengah semakin tingginya tuntutan meningkatnya kualitas pendidikan serta persaingan antar sekolah, sekolah swasta semakin menghadapi tantangan besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam rezim sekolah gratis di Indonesia sekarang ini, keberadaan sekolah swasta menjadi terabaikan. Memang ada sekolah swasta yang tetap eksis, tentu ini menjadi kebahagiaan kita bersama. Tetapi tidak sedikit sekolah swasta yang mengalami kesulitan untuk tetap bertahan, bahkan banyak jumlah sekolah swasta yang tutup.

Tentu ada banyak penyebabnya, namun yang paling utama karena gagal mendapatkan murid sebagaimana yang dibutuhkannya. Beberapa faktor penyebab kegagalan sekolah swasta dalam mendapatkan murid baru antara lain belum ada aturan yang tegas dalam membatasi penerimaan siswa di sekolah negeri, kebijakan atau regulasi pemerintah / pemma yang kadang tidak berpihak pada sekolah swasta, kurangnya kemampuan sarana dan prasarana sekolah swasta, hingga persoalan keuangan dan sumber daya manusia disekolah swasta. ✓

Dalam hal ini, tentu MUKASTA tidak anti terhadap kebijakan pemerintah dengan adanya sekolah gratis karena hal itu telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi disisi lain, pemerintah juga harus tetap memiliki tanggungjawab terhadap pendidikan swasta sesuai dengan ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional.

2. Point aspirasi :

Berdasarkan hal-hal diatas maka Musyawarah Kerja Kepala SMA Swasta (MUKASTA) DIY menyampaikan hal-hal berikut :

a. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Tentu kami sangat mendukung upaya pemerataan peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem Zonasi dalam PPDB. Namun begitu harus disadari bersama bahwa dengan sistem Zonasi tersebut ada penurunan jumlah peserta didik dari luar DIY, tentu ini harus disikapi dengan kebijakan memperbandingkan antara jumlah calon peserta didik yang ada di DIY dengan melihat daya tampung yang sudah ada. Tidak semestinya ada sekolah negeri yang justru menambah jumlah rombongan belajar. Apalagi dalam peristiwa PPDB terakhir, banyak sekolah negeri yang tetap menerima bahkan memanggil peserta didik sekalipun PPDB sudah selesai atau tutup. Kedepan, dalam penyempurnaan sistem zonasi harus pula memperhatikan eksistensi sekolah swasta.

b. Jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) mestinya tidak mengalami kenaikan. Tahun ini ada kebijakan dari pemerintah merubah jumlah peserta didik dalam satu rombel dari 32 siswa menjadi 36 siswa. Tentu hal ini mengakibatkan terserapnya jumlah siswa yang semakin besar ke sekolah negeri. Kami memohon ada batasan kepastian tentang jumlah siswa dalam satu rombel, yaitu minimal 20 dan maksimal 32. Ini akan juga berpengaruh terhadap jumlah jam guru mengajar yang notabene mempermudah guru mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

c. Penarikan Pegawai Negeri Sipil / ASN yang ada di sekolah-sekolah swasta sangat memberatkan dan menjadi problema serius bagi keberlangsungan sekolah swasta. Dalam hal ini kami berpandangan bahwa pada dasarnya layanan pendidikan yang dilakukan oleh guru PNS/ASN tidak lagi melihat dimana guru itu

mengajar atau status sekolahnya negeri atau swasta, tetapi harus melihat siapa yang dilayaninya, yaitu semua anak bangsa termasuk yang ada di swasta. Oleh karena itu selama masih dibutuhkan swasta tidak perlu ditarik ke negeri. Jangan sampai persoalan ketidakmampuan mencukupi guru di sekolah negeri kemudian dibebankan pada sekolah swasta yang berakibat lumpuhnya kegiatan belajar mengajar di sekolah swasta. Justru akan bijaksana apabila sekolah swasta juga ditambah guru ASN. Walaupun toh harus terjadi penarikan ASN dari sekolah swasta, paling tidak ada acuannya sepanjang tidak mematikan sekolah swasta. Misal :

- Tidak menarik ASN yang memegang peranan penting di sekolah swasta (Kepala sekolah atau Wakil kepek) kecuali karena promosi jabatan misalnya guru menjadi Kepala sekolah.
 - Tidak menarik ASN yang menjelang pensiun (misal 3 tahun lagi pensiun), karena hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan, ketentraman hati dan sekaligus kepastian kerja.
- d. Masih dirasakan adanya ketidakseimbangan dalam memberikan kesempatan peningkatan kualitas / kompetensi antara guru yang ada di sekolah negeri dengan yang ada di sekolah swasta. Pengiriman, keterlibatan atau keikutsertaan dalam berbagai kegiatan workshop, diklat, seminar, dsb. yang diselenggarakan oleh pemerintah masih dirasa sangat kurang bagi guru-guru sekolah swasta.
- e. Berharap adanya perubahan dalam pemberian insentif kesejahteraan (dana APBD DIY) bagi guru dan karyawan di sekolah swasta. Selama ini yang diberikan adalah kepada mereka yang diangkat sebelum tahun 2007. Tentu sudah banyak guru / karyawan yang pensiun dan sudah tergantikan dengan yang baru dan belum mendapatkan insentif ini (yang diangkat sesudah 2007). Mohon ada perubahan kebijakan sekaligus peningkatan besaran nominalnya, minimal sesuai Upah Minimum Provinsi, sekaligus memastikan kesetaraan guru swasta dan guru negeri.

- f. Dana BOS Pusat maupun BOSDA tentu sangat besar manfaatnya. Kami berharap ada peningkatan jumlah nominalnya dan sekaligus ada bantuan baru dari APBD DIY untuk sekolah swasta (menunjang sarana prasarana dan kegiatan peserta didik).
- g. Mohon DPRD DIY ikut mendorong kesejahteraan, dan terpenuhinya perlindungan hukum dan profesi guru, melalui Perda atau Pergub. Tidak pada tempatnya guru dalam menjalankan profesinya berada pada ketakutan atau ancaman, baik dari peserta didik, orangtua, pihak lainnya. Guru harus mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan kerja.
- h. Yogyakarta sebagai kota budaya, kota perjuangan, kota wisata, kota pelajar, maka sesuai visi dan misi Pemerintah DIY, mohon DPRD DIY ikut mendorong terwujudnya sistem pendidikan di DIY yang berbasis budaya / kearifan lokal dengan kebhinekaannya dan sekaligus berperan untuk penguatan NKRI.
- i. Mohon DPRD DIY ikut mendorong pengadaan dan penempatan guru daerah di DIY termasuk untuk sekolah swasta dengan biaya APBD.
- j. Masih dirasakan adanya ketidakseimbangan dalam pemberian bantuan bagi peningkatan dan perbaikan sarana prasarana sekolah dengan dana APBN. Mohon menyampaikan ke pemerintah pusat untuk tetap memperhatikan dan semakin meningkatkan pemberian bantuan untuk sekolah-sekolah swasta (rehab gedung, perpustakaan, laboratorium, dan sarana lainnya)
- k. Mohon menyampaikan ke pemerintah pusat untuk menyederhanakan regulasi / mempermudah tentang persyaratan, :
- Kenaikan pangkat, khususnya dari IV a ke berikutnya
 - Persyaratan mendapatkan TPG termasuk aturan beban kerja guru minimal (mestinya 18 jam pelajaran)
 - Aturan impassing/ penyetaraan pangkat / golongan .bagi guru non PNS

- Rekrutmen P3K (Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja) utamanya tentang usia diatas 35 tahun tetap bisa diikutsertakan.
- Guru tidak diberikan beban administrasi yang berlebihan
- Penyederhanaan program Induksi bagi guru pemula dan juga Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- Karena ada keterbatasan SDM mohon ada keleluasaan dalam pengangkatan kepala sekolah di sekolah swasta, baik dalam usia, kepangkatan maupun masa jabatan.

Demikian sebagian dari aspirasi kami, dan pada akhirnya kami mohon kepada DPRD DIY untuk ikut mendorong dan mengkodisikan bahwa setiap kebijakan pemerintah / utamanya pemda DIY dalam bidang pendidikan selalu memperhatikan dan berpihak juga kepada sekolah swasta.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Yogyakarta, 18 September 2019

Ketua



Drs. H. Bashori Muhammad, MM



Sekretaris



Drs. H. Herynugroho, M.Pd